

Pembukaan Rekening Penerima BSU Madrasah Selesai

JAKARTA (KR) - Proses pembukaan rekening baru oleh bank penyalur bagi para penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Non-PNS sudah selesai. Kamis (17/12) hari ini bank telah melakukan proses migrasi data nomor rekening dan nama yang tertera di buku tabungan ke Simpatika.

"Pembukaan rekening baru sudah selesai. Proses migrasi data dari bank penyalur ke Simpatika sedang berlangsung. Secara otomatis akan muncul notifikasi pada akun Simpatika masing-masing guru," terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Zain di Jakarta, Rabu (16/12).

Ia memperkirakan, Kamis hari ini notifikasi tersebut sudah masuk ke akun guru penerima BSU dan bisa langsung diproses untuk tahap pencairan. Hasil verifikasi akhir, total ada 542.901 Guru bukan PNS pada RA/Madrasah yang akan menerima BSU.

Hal senada disampaikan Kepala Subdit Bina GTK MI dan MTs Ainur Rofiq. Menurutnya, Kamis hari ini pihak bank melakukan proses migrasi data ke Simpatika. Pihaknya berharap sudah ada notifikasi dari bank kepada akun Simpatika masing-masing guru penerima. Jika guru sudah menerima notifikasi pada akun Simpatikanya, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, guru mencetak Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 yang tertera di Simpatika. Kedua, guru mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang tertera di

Simpatika, lalu menandatangani di atas meterai

Ketiga, guru mencetak surat kuasa blokir debit dan tutup rekening yang tertera di Simpatika, lalu menandatangani tanpa meterai. Setelah proses ini selesai, kata Ainur Rofiq, guru mendatangi Kantor BRI/BRI Syariah yang ditunjuk dengan membawa KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 dan SP-TJM yang sudah ditandatangani di atas meterai serta surat kuasa yang sudah ditandatangani tanpa meterai.

Selanjutnya, guru mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI/BRI Syariah. Setelah proses selesai, guru menerima buku rekening dan kartu ATM dari pihak bank.

"Guru dapat mengambil atau tetap menyimpan BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 itu sebagai tabungan," tandasnya. **(Ati)-d**



KR-Surya Adi Lesmana

PANORAMA PRAMBANAN: Panorama Candi Prambanan dan permukiman di sekitarnya terlihat dari Perbukitan Dawangsari, Candirejo, Prambanan, Selasa (15/12) malam. Mendekati liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, sejumlah destinasi alam terbuka yang dianggap relatif aman dari ancaman erupsi Gunung Merapi dan Covid-19, telah diincar wisatawan sebagai lokasi berlibur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Presiden Serahkan Kompensasi Korban Terorisme

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menyerahkan kompensasi sebesar Rp 39,205 miliar kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu.

Kompensasi diserahkan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12). Sebelumnya, negara juga telah membayarkan kompensasi Rp 8,2 miliar kepada para korban terorisme yang pelaksanaannya diletakkan pada putusan pengadilan.

Seperti peristiwa bom Gereja Oikumene di Kota Samarinda tahun 2016, bom Thamrin tahun 2016, penyerangan Polda Sumatera Utara tahun 2017, bom Kampung Melayu tahun 2017, peristiwa terorisme Sibolga tahun 2019, dan lainnya.

Menurut Presiden, penyerahan

kompensasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban yang telah belasan tahun menunggu.

Meski diakuinya nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau tidak lagi mampu mencari nafkah, mengalami trauma psikologis, menderita luka fisik dan mental, serta mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya.

Namun, ia berharap kehadiran negara mampu memberikan semangat bagi para korban untuk melanjutkan hidup dan menatap masa depan. "Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, dukungan

moral untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi," ujar Presiden.

Ditegaskan Presiden, negara bertanggung jawab untuk hadir memberikan perlindungan, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan pemulihan kepada para korban kejahatan, termasuk korban tindak pidana terorisme. Pemerintah, imbuhnya, telah berupaya melakukan pemulihan terhadap korban dengan berbagai macam cara.

"Sejak 2018, upaya pemulihan korban dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam bentuk pemberian kompensasi, bantuan medis, dan layanan psikologis, serta rehabilitasi psikososial," ungkap Presiden. **(Sim)-d**

Pemda

Menurut Baskara Aji, meski tidak ada rencana untuk memperlakukan PSBB, tapi Pemda DIY memberikan kebebasan kepada Kabupaten/Kota untuk mengambil kebijakan sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah. Mengingat masing-masing daerah memiliki kewenangan berkaitan dengan itu.

"Saat ini yang menjadi pekerjaan berat Pemda DIY adalah mengurangi potensi

kerumunan menjelang malam pergantian tahun. Semua itu akan bisa diwujudkan dengan baik apabila ada kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat untuk menegakkan Prokes," terangnya.

Sementara itu saat dimintai tanggapan kebijakan bagi pelaku perjalanan wisata dalam negeri melalui udara yang diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif swab test PCR paling

lama 2 X24 jam sebelum keberangkatan seperti yang dilakukan di Bali. Sekda DIY menyatakan, Pemda DIY masih menggunakan aturan lama yakni Pergub 48 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan panduan pelaksanaan pelayanan publik, yang mengharuskan setiap wisatawan wajib menyertakan surat keterangan sehat atau hasil rapid test. **(Ria)-f**

Korupsi,

Jadi, dalam hal ini memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman termasuk dalam gerakan-gerakan pencegahan korupsi. "Diharapkan budaya antikorupsi akan tumbuh kembang di seluruh elemen masyarakat dan segenap anak bangsa," kata Firlil.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan KPK periode 2019-2023 beserta insan KPK merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang merupakan *core business* KPK ke dalam tiga strategi atau pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. Kedua, pendekatan pencegahan dan ketiga, pendekatan penindakan secara tegas.

"Pendekatan pendidikan masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat dalam perkara-perkara korupsi," ujar Firlil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Selain itu, perlu dibangun sistem yang menutup peluang

terjadinya tindak pidana korupsi dan ini, merupakan kunci utama "Pemberantasan korupsi tidak boleh padam," ujar Presiden dalam sambutannya pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia secara virtual, dari Istana Negara, Rabu.

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hadir juga secara virtual Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA, Ketua KPK dan Pimpinan Komisiner KPK, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, para Gubernur, Bupati dan Walikota serta para pegiat dan pejuang Antikorupsi.

Dalam upaya tersebut, ungkap Presiden, pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,

Selain itu, ditambahkan Presiden, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintah harus terus meningkatkan

transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Negara mengungkapkan, reformasi di sektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah merupakan upaya penting untuk memperbaiki peluang terjadinya korupsi.

"Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas," tegas Presiden.

Sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak serta memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah.

Pembinaan sistem yang sedang dilakukan tersebut, ungkap Presiden, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan pengawasan internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah. **(Ful/Sim)-d**

Menagih

Secara sosiologis, situasi ini membawa keuntungan dengan tidak adanya kegaduhan yang terjadi di antara para pendukung, terutama di ruang maya seperti *Facebook* maupun *Twitter*. Kalaupun ada, masih dalam koridor kegaduhan yang wajar yakni seputar pengritisan tawaran program di antara pendukung konstestan. Namun pada sisi lain, tidak banyak publik yang paham seputar program yang ditawarkan konstestan. Dan ini bisa menjadi bumerang bagi publik. Karena mereka tidak akan mampu melihat secara rasional rencana kerja para konstestan yang memenangkan pertarungan. Publik akan gagap untuk menagih janji, karena mereka tidak tahu apa yang akan ditagih.

Politik praktis itu transaksional antara yang memilih dengan yang dipilih. Tentunya dalam konteks ini bukan dalam hal transaksi politik instan dimana suap politik itu terjadi. Akan tetapi transaksi yang bersifat substantif dimana ada sisi edukasi politik dan pemenuhan janji politik jika nantinya terpilih. Sebelum menentukan pilihannya setidaknya publik

memahami dengan baik apa yang menjadi tugasnya. Yakni memastikan dengan baik program yang dibawa masing-masing konstestan memang rasional dan pro terhadap isu-isu publik seperti: keadilan dalam hukum, kesetaraan gender, kesamaan akses pendidikan dan kesehatan, kemudahan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Para pemenang juga harus memahami bahwa *een leiderswegs een lijdensweg*, memimpin itu menderita, setidaknya jalan kepemimpinan yang penuh dengan penderitaan ini sudah banyak ditunjukkan oleh para pendahulu mereka. Tugas pemimpin bukan untuk mengambil sumber daya dan akses atasnya untuk kepentingan diri serta kelompoknya. Yang kemudian berakibat pada teralienasinya publik dari akses-akses pelayanan dan sumber daya yang memang diperuntukkan bagi kesejahteraan mereka.

Dalam demokrasi ada satu hal yang tidak kalah penting di samping adanya jaminan kebebasan warga negara untuk menggunakan hak politiknya, yakni pemenuhan etika politik. Bahwa demokrasi ti-

dak hanya ditegakkan dengan adanya regulasi yang menjamin kesamaan hak untuk berpolitik. Namun juga ada persoalan etika yang bermuara pada rasa (*sense of*). Dimana hal tersebut akan mengontrol apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam praktik berpolitik, apalagi dalam menjalankan pemerintahannya.

Para pemenang kontestasi setelah ini harus fokus pada upaya pemenuhan janji-janji politiknya, dan tugas publik selanjutnya adalah melakukan kontrol dan pengawasan. Sudah tidak perlu lagi melakukan glorifikasi atas pasangan calon yang dimenangkannya karena itu hanya akan mencoreng praktik demokrasi. Para calon pemenang itu harus diawasi, dan mengawasi adalah kebutuhan kita sebagai pemberi mandat. Mari pastikan para pemenang itu bekerja untuk memikirkan kesejahteraan, keadilan, kesamaan, dan kesetaraan rakyat untuk mengakses pelayanan dan sumber daya. Para pemenang itu harus ingat *leiden is lijdend*. (*Penulis adalah peneliti sosial politik PSP UGM dan Tenaga Ahli DPRD Sleman*)-d

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

SAAT LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU

Ganjar Minta Jam Operasional Mal-Obwis Dibatasi

SEMARANG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta pemerintah kabupaten/kota melakukan pembatasan jam operasional objek wisata (Obwis) dan mal. Jika pembatasan sulit dilakukan, orang nomor satu di Jateng ini minta mal dan Obwis ditutup. Hal ini untuk menghindari adanya kerumunan pada saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal ini ditegaskan Gubernur Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang Rabu (16/12). Ganjar minta semua dievaluasi. "Kita minta kontrol dari Dinas Pariwisata, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI. Harus ada pembatasan-pembatasan di objek wisata, mal, restoran, dan pusat keramaian lain. Kalau itu sulit, ditutup saja," tegas Gubernur. Hingga saat ini, lanjut Ganjar, sudah ada daerah yang mulai melakukan pembatasan-pembatasan, seperti di Kota Semarang, dengan pembatasan dari segi traffic dan Kabupaten Blora yang mulai menerapkan pembatasan jam operasional. Gubernur berharap bupati/wali kota lain di Jawa Tengah juga melakukan hal sama dengan kondisi lokalitas yang ada.

Arahan untuk tidak ada kerumunan dan perayaan saat libur akhir tahun dan malam pergantian tahun juga sudah disampaikan kepada bupati/wali kota. Menurut Ganjar, arahan untuk tidak ada perayaan itu bukan berarti sama sekali tidak ada. Perayaan tetap bisa dilakukan dengan difasilitasi pemerintah daerah berupa perayaan digital melalui streaming di media sosial, atau bekerja sama dengan media penyiaran nasional atau lokal.

Begitu juga untuk perayaan agama. Beberapa waktu lalu sudah diadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tokoh agama. Hasilnya disepakati adanya pembatasan tetapi tidak menghilangkan esensi dari perayaan itu, sehingga bisa khidmat. Perayaan keagamaan bisa dilakukan dengan jumlah peserta terbatas. "Dengan cara itu masyarakat masih tetap bisa merayakan meskipun rasanya berbeda dengan perayaan pada tahun sebelumnya. Hari ini semua punya kesempatan, hanya sistemnya saja diubah. Kalau menciptakan kerumunan tidak kami izinkan," tegas Gubernur. **(Bdi)-f**

GALERI DI BANDARA

Dorong UMKM Naik Kelas

JAKARTA (KR) - Sebagai wujud komitmen *agent of development* untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pariwisata daerah, PT Angkasa Pura I (Persero) mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai programnya. Salah satunya dengan penyediaan Galeri UMKM di hampir seluruh bandara yang dikelolanya dengan total luasan mencapai 2.312 meter persegi dan berpotensi melibatkan 650 pelaku UMKM.

Dalam menyediakan fasilitas Galeri UMKM ini, Angkasa Pura I bekerja sama pemangku kepentingan lokal seperti Pemerintah Daerah, asosiasi, para pelaku seni, kelompok pegiat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lainnya.

"Angkasa Pura I senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi di Jakarta, Rabu (16/12).

Saat ini, AP I telah menyiapkan 13 konsep Galeri UMKM di 13 bandara yang dikelolanya. Sebagai contoh, Galeri UMKM Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggunakan konsep Peken Tanten atau Summer in Bali, Galeri UMKM Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Pasar Terapung), Galeri UMKM Bandara El Tari Kupang (Pasar Katemak), Galeri UMKM Bandara Juanda Surabaya (Pasar Suramadu), Galeri UMKM Bandara Internasional Yogyakarta men-

gusung konsep Pasar Kota Gede, dan lainnya.

Dari 13 Galeri UMKM tersebut, enam di antaranya sudah berdiri sedangkan empat Galeri UMKM masih pada fase 1 (tahap penyiapan konsep dan penyelesaian potensi mitra) dan tiga Galeri UMKM sisanya telah masuk pada fase dua. Adapun enam Galeri UMKM yang sudah berdiri, yaitu di Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara SAMS Sepinggah Balikpapan, dan Bandara Sentani Jayapura.

Sedangkan tujuh Galeri UMKM yang tengah dalam tahap pengembangan, yaitu Galeri UMKM di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara El Tari Kupang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Lombok Praya, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Adisutjipto.

Dijelaskan Faik, komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci bagi keberlanjutan bisnis, dimana para pemangku kepentingan mendapatkan manfaat dari keberlangsungan bisnis perusahaan. "Melalui Galeri UMKM di bandara ini, para UMKM yang berada di wilayah bandara Angkasa Pura I memiliki kesempatan untuk memanfaatkan galeri tersebut, sehingga meningkatkan peluang produk-produk mereka dapat diperkenalkan dan dipasarkan ke penumpang pesawat," ujarnya. **(Imd)-d**

Jakarta

"Kita prioritasnya di udara, untuk menyertakan itu (hasil rapid test antigen)," ujar dia lagi.

Syafrin belum bisa menjelaskan secara teknis. Menurut dia, saat ini, Dishub DKI masih menunggu regulasi resmi mengenai kebijakan ini dari Kementerian Perhubungan.

"Ada dua periode waktu untuk angkutan darat, perkeretaapian dan udara itu tanggal 18 Desember-4 Januari, sementara untuk angkutan laut sampai dengan tanggal 8 Januari," terang Syafrin.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut bakal mulai memberlakukan kebijakan pemeriksaan Covid-19 menggunakan rapid test antigen bagi masyarakat yang keluar masuk ibu kota melalui bandara. Upaya ini dilakukan sebagai langkah

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Cuaca			Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam		
Bantul				23-31	65-95
Sleman				23-30	70-95
Wates				23-31	65-95
Wonosari				23-31	65-95
Yogyakarta				23-31	70-95